

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MATI PADA TERPIDANA NARKOTIKA

Oleh:

IMAS BOWO ARI SAPUTRA

Pidana mati di Indonesia merupakan salah satu jenis hukuman pokok, hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 10 Huruf (a) ke-1 Undang-Undang 1 tahun 1946, tentang peraturan hukum pidana atau yang lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP). Pemberian hukuman mati untuk tindak pidana peredaran narkotika merupakan salah satu langkah yang perlu dilakukan negara untuk mengeksekusi para pengedar atau bandar narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 (tiga puluh lima) tahun 2009, tentang narkotika dengan memberikan hukuman mati bagi bandar narkoba. Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang dapat penulis analisis adalah: 1. Bagaimana pengaturan hukuman mati di Indonesia? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus hukuman mati pada perkara nomor 160/pid.Sus/2019/PN Sdn.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu mengenai Penerapan Hukum Pidana mati terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman Yang Melebihi 5 (lima) gram" dalam Putusan Perkara Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Sdn telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 (tiga puluh lima) tahun 2009, tentang Narkotika dan Subsidiar Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang. RI Nomor 35 (tiga puluh lima) tahun 2009, tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 (tiga puluh lima) tahun 2009, tentang Narkotika.

Berdasarkan kesimpulan maka penulis dapat memberikan saran yaitu Perlu sanksi tegas dan penerapan yang adil dalam pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku pengedar narkotika agar tercapainya penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang berisikan sanksi pidana mati bagi pelaku pengedar narkotika, dalam memberikan sanksi pidana mati dapat memberikan efek jera pada pelaku pengedar narkotika lainnya.

Kata kunci: putusan Terpidana, Narkotika

ABSTRACT

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MATI PADA TERPIDANA NARKOTIKA

**Oleh:
IMAS BOWO ARI SAPUTRA**

Capital punishment in Indonesia is one of the main types of punishment, this is expressly regulated in Article 10 Letter (a) 1 of Law 1 of 1946, concerning criminal law regulations or better known as the Criminal Code (Criminal Code). The granting of the death penalty for drug trafficking is one of the steps the state needs to take to execute drug dealers or dealers who can damage the nation's generation. With the existence of Law Number 35 (thirty-five) of 2009, concerning narcotics by giving capital punishment to drug dealers. Based on the background above the problems that the writer can analyze are: 1. How is the death sentence regulated in Indonesia? 2. How is the judge's consideration in deciding the death penalty in case number 160 / pid.Sus / 2019 / PN Sdn.

Based on the results of the analysis and discussion, the conclusions in this study are about the Application of the Death Penal Code for the Abuse of Narcotics Group I (one) "Without Rights and Against the Law Accepting Narcotics Group I (one) Non-Plants Exceeding 5 (five) grams" in the Case Decision Number 160 / Pid.Sus / 2019 / PN Sdn is correct. The Public Prosecutor uses 2 (two) charges, namely: Primair Article 114 Paragraph (2) RI Law Number 35 (thirty-five) in 2009, concerning Narcotics and Subsidiar Article 115 Paragraph (1) of the Law. RI Number 35 (thirty-five) of 2009, concerning Narcotics. Among the second elements of the Article indicted by the Public Prosecutor, which was proven legally and convincingly guilty was Article 114 Paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 35 (thirty-five) in 2009, concerning Narcotics.

Based on the conclusion, the writer can give advice, namely strict sanctions and fair application in giving capital punishment for narcotics dealers in order to achieve the application of Law Number 35 Year 2009, which contains capital punishment for narcotics dealers, in providing criminal sanctions death can have a deterrent effect on other narcotics dealers.

Keywords: Convicted verdict, Narcotics